

Analisis Faktor Kegagalan Referendum Catalunya Tahun 2006 – 2017

Ditya Irene¹
Mansur²

Abstract

This study discusses the factors that led to the failure of the Catalunya referendum that wanted secession with its united state, Spain. This research asks research questions about How Factor Failure Analysis Referendum Catalunya In 2006 - 2017. This study used a qualitative approach and descriptive method of analysis. In this study, the authors describe the factors underlying Catalunya's desire to separate from Spain, and explain the dynamics of Catalunya's political ties with Spain before and after the enactment of the new Catalunya autonomy law revised by the Catalunya parliament, then four years after the enactment of the law, the Spanish constitutional court declared that the new law was unconstitutional and violated the Spanish Constitution and uprooted a previously approved 'state' status on Catalunya. After the policy was set by the people of Catalunya rallied on the streets of Barcelona, not until there Catalunya continue to do secession efforts to the peak on October 1 to vote for a referendum of independence Catalunya unilaterally. The results of this study show that the main factor of Catalunya's failure in its attempt to secede, that is the 155th Spanish Constitution which has the power of law to be able to reclaim control of autonomous community institutions in circumstances that harm the public interest of Spain.

Keywords: *autonomy law, constituional court, self-determination, secession, referendum of independence*

Pendahuluan

Dalam sejarahnya penduduk Catalunya tidak pernah merasa diri mereka sebagai bagian dari Spanyol karena ada tiga faktor yang mendasari hal tersebut, yakni, budaya dan bahasa; konstitusi; dan politik. Pada puncaknya yakni referendum kemerdekaan Catalunya pada tanggal 1 Oktober 2017 yang di sampaikan oleh Presiden Catalunya, Carles Puigdemont atas mandat dari rakyat Catalunya yang memberikan suara mereka dengan 2,25 juta pemilih. Menurut pemerintah Catalunya, hasil referendum dengan presentase

¹ Mahasiswa, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. email: dityai@rocketmail.com

² Tenaga pengajar pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur.

90% (<https://theguardian.com>, 2017) bahwa pemilih mendukung kemerdekaan dari Spanyol.

Catalunya merupakan wilayah yang berbentuk segitiga di sudut timur laut Spanyol, Catalunya dipisahkan oleh pegunungan Pyrenean dari Prancis Selatan, dan Andorra. Catalunya adalah salah satu 17 otonomi komunitas Spanyol dan memiliki populasi 7,477,131, menurut sensus penduduk tahun 2017 (<https://idescat.cat>, 2017). Sebagian besar penduduk di wilayah ini tinggal di Barcelona, pusat politik, ekonomi dan tujuan wisata Eropa yang populer serta salah satu pusat daerah metropolitan di Eropa. Daerah ini terdiri dari beberapa provinsi yang berbeda, termasuk Barcelona, Girona, Leida, dan Tarragona. Komunitas otonom memegang 16% dari total populasi Spanyol, menjadikannya komunitas terpadat kedua di Spanyol (Marinzel, 2014 : 2).

Catalunya adalah salah satu wilayah yang besar dan penting bagi Spanyol hal ini terlihat dari berbagai kompetensi yang signifikan yang dimiliki Catalunya, baik dari bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (<http://riskhedge.com>, 2017). Catalunya memiliki bahasa sendiri yakni bahasa Katalan. Bahasa Katalan adalah salah satu bahasa di wilayah Spanyol yang merupakan keturunan langsung bahasa latin yang berbasis di Eropa Selatan dan mengacu pada bahasa-bahasa Romawi namun berbeda dari bahasa Spanyol, yang dipengaruhi oleh bahasa Arab yang menguasai sebagian besar wilayah Spanyol di abad pertengahan. Bahasa Katalan merupakan bahasa resmi atau bahasa daerah yang dimiliki dan digunakan sehari-hari di Catalunya. (<http://differencebetween.net>, 2017)

Di bawah pimpinan Raja Juan Carlos I, Spanyol beralih ke demokrasi dan lingkungan politik Catalunya berubah, yang memungkinkan masyarakat Catalunya membentuk dan mengembangkan budaya politik mereka sendiri dalam sebuah komunitas otonom. Catalunya menyetujui Statuta Otonomi yang didirikan untuk menjalankan konstitusi Spanyol tahun 1978 dan undang-undang otonomi Catalunya tahun 1979. Di dalam peraturan tersebut mendefinisikan mengenai hak dan kewajiban masyarakat Catalunya, hubungan Catalunya dengan Spanyol dan pengaturan fiskal daerah terhadap pemerintah Spanyol (Cultiaux, 2006).

Undang-undang otonomi Catalunya yang telah di revisi sebagai dasar hukum Catalunya dari tahun ke tahun terus menjadi kontroversi di pihak nasionalis Spanyol serta beberapa daerah otonom Spanyol lainnya. Partai "*Partido Popular*" sebagai salah satu partai yang mendominasi di pemerintahan pusat telah mengajukan banding atas beberapa artikel dari undang-undang otonomi Catalunya yang dianggap tidak konstitusional, khususnya mengenai definisi Catalunya sebagai sebuah 'negara'. Atas banding tersebut, pada tahun 2010 Mahkamah Konstitusi Spanyol memutuskan untuk mengamandemen undang-undang otonomi Catalunya dan menyatakan bahwa Catalunya atas dasar hukum tidak diakui sebagai sebuah negara. Keputusan ini menyebabkan kemarahan yang meluas di Catalunya dan terjadinya demonstrasi yang besar (Smith, 2017).

Upaya pemisahan diri dari Spanyol kembali muncul, semangat nasionalis memuncak setelah keputusan oleh pengadilan konstitusional Spanyol telah banyak membantah undang-undang yang telah disetujui oleh parlemen Catalunya dan menetapkan batasan klaim Catalunya untuk kebangsaan. Masyarakat Catalunya kerap melakukan demonstrasi yang melibatkan banyak demonstran. Pada 9 November 2014 Catalunya mengadakan "konsultasi publik" dikarenakan pengadilan konstitusional menyatakan bahwa undang-undang referendum Catalunya ilegal. Jajak pendapat tersebut dimaksudkan untuk uji coba referendum dan mampu menarik lebih dari 2,5 juta pemilih sebagai demonstrasi terbesar di Eropa. Semangat nasionalis Catalunya semakin meningkat sampai dengan 1 Oktober 2017 dimana telah dilakukan pemungutan suara untuk referendum kemerdekaan Catalunya dan dalam bulan dan tahun yang sama tanggal 27 Oktober 2017 Catalunya mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol secara unilateral.

Namun kemerdekaan tersebut tidak diakui oleh banyak negara termasuk Indonesia (<http://thejakartapost.com>, 2017).

Pada penelitian ini, penulis berfokus untuk menganalisis kegagalan referendum Catalunya dari Spanyol pada periode tahun 2006 – 2017. Catalunya adalah bagian dari 17 wilayah otonom di Spanyol. Pada tahun 2006, parlemen Catalunya dan pemerintah pusat menyetujui statuta otonomi Catalunya yang baru, yang mana Catalunya telah membuat perubahan dalam statuta otonominya yang memberikan banyak kekuasaan pada Catalunya serta pemberian status "*nation*" kepada Catalunya. Akan tetapi, selang 4 tahun status tersebut dicabut kembali pada tahun 2010 oleh Mahkamah Agung Spanyol karena melanggar konstitusi 1978, yang salah satu pasalnya berbunyi "setiap wilayah merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Spanyol" (konstitusi Spanyol 1978). Hal ini secara perlahan membangkitkan kembali semangat Catalunya untuk memerdekakan diri dari Spanyol. Maka timbulah gerakan-gerakan separatisme. Pada tahun 2017, terjadi referendum kemerdekaan Catalunya oleh Presiden Catalunya yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol. Gerakan-gerakan separatisme warga Catalunya untuk memisahkan diri dari Spanyol merupakan indikator dinamika ketegangan hubungan politik Catalunya dan Spanyol.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah penulis uraikan di atas maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: "Bagaimana Analisis faktor kegagalan Referendum Catalunya Tahun 2006 – 2017."

Pembahasan

Penentuan Nasib Sendiri (Self-determination) Bangsa Catalunya

Lebih dari tiga dekade setelah pemulihan *Generalitat De Catalunya* (Pemerintah Catalunya), klaim untuk pemerintahan sendiri dan hak-hak nasional diekspresikan dengan lebih dan menumbuhkan semangat nasionalis lebih banyak lagi di masyarakat Catalunya. Semenjak saat itu Catalunya menjadi wilayah yang mandiri dan memiliki tatanan pemerintahan yang kuat. Lembaga-lembaga di Catalunya, partai politik dan masyarakat sipilnya terus berupaya menemukan kecocokan di Spanyol yang akan memenuhi aspirasi nasional yang sesuai di Catalunya. Selama ini, Catalunya berhasil membangun struktur politik dan administrasi yang telah mengubah *Generalitat* menjadi pemerintahan yang mampu menopang kehidupan masyarakatnya (Mermel, 2006: 8).

Namun, peristiwa hukum Spanyol tentang pendidikan, serangan terhadap model koeksistensi bahasa Katalan, hukum tentang kesatuan pasar, undang-undang baru yang sangat membatasi otonomi dan melemahnya keuangan *Generalitat* oleh lembaga-lembaga pusat, semuanya menyurutkan visi yang terlalu sentralistik dan proses yang tidak konsisten mengenai distribusi kompetensi dan sumber daya yang dilakukan oleh negara Spanyol. Semua ini menimbulkan keraguan, makna sebenarnya dari Negara Otonomi yang semangat Konstitusi 1978 ditangkap secara konsensual (Bonime, 418).

Pada tahun 2004, komisi parlemen yang meluncurkan usaha untuk membuat statuta otonomi baru telah dibentuk. Hal ini dibentuk dengan tujuan mencari metode baru untuk lebih mempererat hubungannya dengan Spanyol, memperkuat sifat nasionalisme Catalunya dan melanjutkan pemerintahan sendiri. Setelah berbulan-bulan bernegosiasi statuta otonomi baru disetujui oleh Parlemen Catalunya. Pada bulan Juni 2006, Statuta tersebut menjadi sasaran referendum di antara masyarakat Catalunya, yang sangat mendukungnya. Setelah itu dikirim ke Mahkamah Konstitusi, empat tahun kemudian mengeluarkan keputusan tegas yang tidak hanya mengurangi kompetensi dan institusi fundamental dalam pengembangan pemerintahan mandiri di Catalunya namun juga

menggagalkan harapan nasional. (*White Paper III The National Transition of Catalonia*: 11). Keinginan masyarakat Catalunya untuk mencari penentuan nasib sendiri bukanlah sebuah materi yang sederhana dengan satu penyebab. Sebaliknya, hal ini berasal dari berbagai sumber, termasuk penolakan hak minoritas, sengketa teritorial, aspirasi nasional dan keyakinan akan kelayakan ekonomi dan politik. Keyakinan ini bisa berkembang secara bertahap sampai upaya untuk melakukan aksi kekerasan dalam tujuan pemisahan diri (Suesse, 2016: 3).

Proposisi terkait aspek hukum dalam penentuan nasib sendiri. Pilihan untuk bangsa Catalunya melakukan sebuah perjuangan untuk menentukan nasib sendiri yang tidak harus dilakukan dilihat dalam istilah *zero sum of independence* atau asimilasi, terlepas dari kenyataan bahwa hukum internasional cenderung memperkuat pendekatan ini. Hal ini terjadi karena hak menentukan nasib sendiri ialah prinsip hukum internasional yang dapat ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional. Berdasarkan hukum internasional, bangsa Catalunya menggunakan peluang untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) dalam konsep tersebut menyatakan bahwa hak semua bangsa untuk bebas menentukan status politik mereka dan bebas mengejar ekonomi, sosial, dan budaya mereka (Pasal 1 ayat 1 Perjanjian Konvenan Hak Sipil dan politik).

Identifikasi hak bangsa Catalunya dalam penggunaan *self-determination*, sangat memungkinkan untuk mendapatkan hak penentuan nasib sendiri yang mana bangsa Catalunya memiliki identitas kelompok yang menjadi basis tuntutan mereka. Secara khusus, bangsa Catalunya mendapatkan hak berpartisipasi dalam institusi seperti majelis nasional urusan minoritas, pemerintah daerah otonom, bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi dan lokal, serta komisi gabungan (baik regional maupun internasional) untuk memfasilitasi dialog berkelanjutan, namun yang menjadi masalah adalah bukan pertanyaan bahwa Catalunya berhak dalam penentuan nasib sendiri namun apakah masyarakat Catalunya bisa menggunakan hak penentuan nasib sendiri. Konstitusi Spanyol menyatakan bahwa negara bagian tidak dapat dibagi dan menghubungkan jaminan untuk pemerintahan sendiri seperti Catalunya, sampai saat ini dan dalam ketentuan yang sama (Konstitusi Spanyol Pasal 2).

Dalam realitanya Spanyol melanggar hak penentuan nasib sendiri masyarakat Catalunya sehubungan dengan hak asasi manusia, dalam fokus kelompok. Penolakan Spanyol untuk menerima kemungkinan kemerdekaan Catalunya secara nyata meniadakan gagasan penentuan nasib sendiri. Konstitusi Spanyol sendiri mengacu pada tujuan melindungi semua masyarakat Spanyol dalam menjalankan hak asasi manusia, budaya dan tradisi serta bahasa dan institusi mereka (Pembukaan Konstitusi Spanyol). Dengan cara yang sama, undang-undang otonomi Catalunya mendefinisikan Catalunya sebagai "kewarganegaraan" dan menyatakan bahwa kekuasaan institusi publik Catalunya berasal langsung dari masyarakat Catalunya.

Pemisahan Diri (Secession) bangsa Catalunya

Sesuai dengan konsep yang penulis gunakan dalam hal ini pemisahan diri, Catalunya juga memiliki gerakan untuk memisahkan diri dengan meminta sebuah teritorial baru yang punya legitimasi setingkat sebuah negara. Dalam pernyataan pemimpin Catalunya, pada pidato politiknya untuk menarik diri dari wewenang pusat Spanyol yang meliputi aktivitas Catalunya yang berada di wilayah pusat yang bermaksud mendirikan negara baru diluar batas kedaulatannya saat ini (*Official Statement by the President on the Political Situation*, 2017).

Dalam mencapai tujuannya untuk memisahkan diri, masyarakat Catalunya melakukan bentuk protes dalam skala besar untuk meminta perpisahan wilayah.

Perjuangan Catalunya dalam persaingan untuk kekuasaan atau perselisihan teritorial yang dilakukan Catalunya dapat mengambil bentuk hak umum untuk suatu negara, sebagai pengganti ketidakadilan di masa lalu. Dalam sejarahnya Catalunya mendapatkan ketidakadilan di Spanyol, diskriminasi, dan korban pelanggaran hak asasi manusia. Adanya hubungan atau korelasi yang kuat antara gerakan nasionalis Catalunya dengan pemerintah Spanyol untuk memisahkan diri ini terlihat sangat jelas dimana pada di setiap pihak yang memberikan kebijakan akan ada tanggapan atau respon di pihak lainnya. Hal ini dibuktikan pada Januari 2014 parlemen Catalunya membuat petisi formal yang meminta pemerintah Spanyol untuk mentransfer kekuatan yang diperlukan untuk mengadakan referendum. Hal ini dengan cepat di respon oleh parlemen Spanyol dan memberikan respon bahwa Spanyol memilih untuk tidak mengalihkan kekuasaan referendum ke Catalunya dalam tahun yang sama pada April 2014 (<http://cataloniavotes.eu>). Momen ini adalah salah satu dari banyak momen korelasi di antara Catalunya dan Spanyol. Hal ini membuktikan adanya korelasi antara pemerintah pusat dan Catalunya dan hal ini terlihat seiring eksalasi *secessionis*. (Suesse, 2017: 1).

Dalam penggunaan konsep *secessionis* ini mengandalkan aksi ekstrim sebagai akhir dari perjuangan untuk memisahkan diri, yang mana terjadinya peristiwa pertumpahan darah hingga gerakan ini mendapatkan tujuannya dan menyuarakan hak-hak kemerdekaan (Cogins, 2006). Akan tetapi dalam permasalahan yang penulis angkat tidak terjadi indikator pertumpahan darah yang mencerminkan gerakan *secession* ini. Usaha Catalunya dalam menyuarakan hak pemisahan diri terlihat dari usahanya yang melihat ke dalam sejarah yang mana salah satunya dalam sejarah tersebut bahasa Catalan dibatasi penggunaannya. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan tuntutan mereka untuk merdeka dari Spanyol.

Catalunya didefinisikan sebagai sebuah bangsa berdasarkan bahasanya, dan karenanya hubungan antara bahasa dan bangsa selalu menjadi pusat bagi semua wacana nasionalis. Saat bahasa Katalan diserang oleh kediktatoran Franco, kepentingan politiknya meningkat. Dengan demikian, nasionalisme budaya menyediakan berbagi pandangan untuk sebuah gerakan yang terpecah secara politis. Dalam dunia internasional, bahasa adalah sebuah hak sesuai dengan perjanjian internasional tentang bahasa minoritas bahwa perlindungan bahasa minoritas adalah kewajiban hak asasi manusia (<http://un.org>, 2013). Pertama, hampir semua penghuninya tahu bahasa Spanyol meskipun bagian dari populasi tidak tahu bahasa Catalan. Kedua, wilayah bahasa Catalan milik negara yang lebih besar, di mana mayoritas bahasa lain dan dimana pengetahuannya dan penggunaan bahasa Spanyol atau bahasa Prancis adalah wajib. Apalagi domain bahasa Catalan tidak sesuai dengan satu negara bagian. Dan akhirnya, Bahasa Katalan jarang pemakaiannya di beberapa sektor kehidupan sosial. Hasilnya didapat di Catalunya dalam tiga puluh tahun kebijakan mengenai bahasa dalam fungsi bahasa sebagai instrumen kohesi sosial (<http://sindic.cat>). Dalam gerakan budaya memberikan dasar ilegal untuk penyebaran nasionalisme, selanjutnya nasionalisme politik berkembang di Spanyol pada akhir abad ke-19, terutama di wilayah Catalunya yang mempelori revolusi industri negara tersebut dan mengalihkan kekuasaan finansial dari Madrid dan pusat administrasi negara tersebut (<https://nytimes.com>, 2017).

Arena politik komunitas otonomi Catalunya didominasi oleh anggota serikat yang rentan untuk mempertahankan hubungan konstitusional Catalunya dengan Spanyol sampai awal 2010, ketika keputusan Mahkamah Konstitusi Spanyol tentang Statuta Otonomi Catalunya; dan penolakan dari pemerintah pusat untuk menawarkan sebuah pemerintahan yang baru dengan pengaturan baru, sehingga menghasilkan pembentukan arena politik Catalunya baru yang didominasi oleh kelompok separatis yang membangun sebuah negara bagian yang independen. Para separatis, mengambil kendali pemerintah setelah pemilihan

umum Catalunya pada tahun 2012. Sementara pemerintah Catalunya dengan agenda politik yang pro-kemerdekaan sekarang bertujuan untuk meyakinkan pemerintah Spanyol memberdayakan parlemen Catalunya untuk mengadakan referendum kemerdekaan di Catalunya (*de jure referendum*). Hal ini membuktikan bahwa pemerintah komunitas otonom dengan agenda politik separatis, sekarang bertujuan untuk membujuk pemerintah Spanyol untuk mengizinkan parlemen Catalunya mengadakan referendum kemerdekaan yang mengikat secara hukum di Catalunya. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya protes *secessionis* untuk memisahkan diri tidak menyebabkan pemimpin Catalunya, Puigdemont itu bertindak sesuai tekanan separatis. Sebaliknya, Puigdemont punya agenda sendiri untuk memisahkan diri, walaupun dia sudah diberikan hak dan sudah mengakomodasikan kepentingannya. Inti dari konsep *secessionis* ini berada di tangan pemimpinnya (Suesse, 2017: 1). Negara-negara multi-etnis seperti Spanyol merupakan tempat bagi banyaknya gerakan menuntut pemisahan diri. Pemisahan diri dilihat sebagai kegagalan rejim nasional untuk menanamkan kesadaran berbangsa (Wardhani, 42). Hal ini diperburuk oleh ketidakmampuan negara dalam mengolah aspirasi rakyat dengan mengambil cara-cara maupun kebijakan yang tidak tepat seperti sentralisasi. Pemisahan diri ini memiliki emosional yang tinggi, terlepas dari unsur berhasil tidaknya proses integrasi bangsa. Namun, keinginan pemisahan diri dan politik tidak mungkin terjadi bila tidak ada bantuan dan dukungan pihak luar negeri, baik negara atau organisasi internasional (Wardhani, 37).

Identitas Bangsa Catalunya

Faktor identitas memiliki efek terbesar dalam memilih kemerdekaan, baik secara absolut maupun relatif. Identitas nasional Catalunya mencakup unsur-unsur seperti sejarah, sebuah komunitas dengan tradisi dan bahasanya sendiri, dan kehendak kolektif untuk pemerintahan sendiri berdasarkan konsepsi inklusif tentang "Catalanness" (Boylan, 2015: 773). Identitas merupakan salah satu unsur penting yang dimanfaatkan oleh kelompok pemisahan diri dari entitas politiknya saat ini. Identitas menyediakan ruang bagi kelompok pemisahan diri untuk mengekspresikan perbedaannya dari kelompok di luar kelompoknya dan karenanya memberi pembenaran akan pemisahan diri. Identitas terasa lebih kuat ketika mendapat perlakuan tidak adil dari pemerintah negara yang mengontrolnya. Perlakuan tidak adil itu memperkuat sentimen etnis yang menimbulkan rasa tertekan atau tertindas di kalangan kelompok identitas tersebut (Wardhani, 36).

Catalunya telah berjuang dari pemerintah pusat Spanyol untuk pelestarian institusi mereka, ruang budaya, dan untuk pemerintahan sendiri yang lebih besar sejak penggabungan mereka ke mahkota Kastilia pada tahun 1715 (Lohmar, 2015: 6). Hal ini tak luput dari sejarah peristiwa rezim kediktatoran Franco (1939-1975) yang membatasi, bahkan melarang bahasa Catalan. Bahasa Catalan menghilang dari sistem pendidikan dan beberapa ribu nasionalis terbunuh atau diasingkan. Semua Penggunaan bahasa Catalan secara resmi diserang dan radio, televisi, dan nama-nama jalan diubah menjadi bahasa Spanyol Kastilia.

Dalam sejarah Catalunya, pemerintah Spanyol telah gagal membela atau mewakili Catalunya, begitu banyak masyarakat Catalunya merasa berbeda dari Spanyol (Marinzel, 2014: 7). Banyak organisasi di dalam Catalunya berdedikasi untuk meningkatkan kehadiran Catalunya secara internasional. Sejak tahun 2000, lebih dari satu juta penduduk telah bermigrasi ke Catalunya, dan imigran terbanyak bertutur kata sebagai pembicara non-Katalan. Catalunya telah mengajarkan bahasa mereka kepada orang asing dengan memulai konsorsium untuk normalisasi bahasa.

Program normalisasi bahasa hanya bisa dikatakan berhasil bila bahasa yang dimaksud digunakan secara normal dalam setiap situasi (Miller, 2017: 123). Dalam hal ini, semua wilayah sasaran; administrasi publik, media, pendidikan, perdagangan dan industri, sektor budaya dan sosial, sama penting. Meskipun demikian, ada beberapa sektor kunci yang dianggapnya normalisasi itu harus dicapai dan harus dilihat efektif untuk mendapatkan dukungan publik dan karena itu menjaga kesuksesan keseluruhan dari program. Pendidikan adalah salah satu bidang utama; itu guru standar dan penggunaan yang benar dan pada saat bersamaan dapat membantu mendidik sikap. Negara pendidikan adalah tanggung jawab *Generalitat* dan dengan demikian menjadi fokus inisiatif normalisasi awal. Menjelang akhir era Franco, beberapa orang Catalunya diajarkan di sekolah karena upaya *Omnium Cultural*, sebuah budaya, *non-profit-making* organisasi yang pernah dilarang oleh Franco. Namun, baru pada tahun 1978 dekret kerajaan 1992 menandai langkah legislatif penting pertama menuju kunci kembali ke dunia pendidikan dengan memberi Catalunya status hukum di sekolah. Hal itu membuat Catalunya menjadi subjek wajib di pra-sekolah, primer dan sekunder pendidikan.

Penggunaan bahasa Katalan dan proses normalisasi di semua sekolah mendukung kelangsungan bahasa Katalan. Posisi dan sikap penutur asli bahasa Katalan melawan asimilasi upaya para imigran yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bahasa Katalan. Mayoritas masyarakat yang berbahasa Kastilia yang tinggal di daerah Catalunya ingin belajar bahasa Katalan dan menjadi efektif *bilingual* agar mereka tidak perlu mengidentifikasi diri mereka sebagai masyarakat Catalunya. Normalisasi bahasa Katalan telah di rancang sejak 84,7 persen orang yang tinggal di Catalunya berbicara dengan bahasa Katalan, undang-undang otonomi yang sudah direvisi tahun 2006 tentang mengalokasikan bahasa Katalan sebagai bahasa preferensial untuk memprioritaskan penggunaan bahasa Katalan lebih dari bahasa Kastilia di institusi publik (<http://democraticprogress.org>, 2017: 12).

Pembuktian kegagalan pemisahan diri Catalunya

Pada tanggal 21 Oktober 2017 pihak Spanyol mengadakan rapat menteri kabinet darurat. Perdana menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengumumkan akan menggunakan konstitusi Spanyol pasal 155 dalam menangani sikap Catalunya yang akan menderklasikan kemerdekaan. Sejauh ini langkah-langkah yang akan diambil dianggap sulit untuk interpretasikan langkah-langkah ini dinamakan "*nuclear option*". Sebelum diimplementasikan untuk pertama kalinya, Pasal 155 akan menanggung resiko yang tidak sedikit bagi peraturan internal Catalunya. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, mengadakan konferensi pers yang mengumumkan hasil rapat kabinet tentang penggunaan Konstitusi Spanyol Pasal 155 di Catalunya. Polisi Catalunya (*Mossos d'Esquadra*) juga terkena dampak dari krisis konstitusi ini dimana polisi Catalunya akan dikendalikan oleh polisi Madrid. *Mossos d'Esquadra* akan langsung dikendalikan oleh "otoritas yang dibuat oleh eksekutif Spanyol. Hal memungkinkan yang akan terjadi dimana petugas polisi Catalunya diganti oleh petugas polisi Spanyol. Kemungkinan itu bisa saja terjadi karena kementerian dalam negeri Spanyol telah menghentikan jabatan kepala polisi Catalunya (<http://www.cataloniavotes.eu>, 2017: 1).

Sebuah penetapan yang sudah ditetapkan di Parlemen Catalunya akan sebuah usul untuk menyatakan kemerdekaan dari Spanyol, hal ini dilakukan dikarenakan bahwa sebuah referendum yang dipertanyakan pada tanggal 1 Oktober memberi referensi untuk memisahkan diri dari Madrid (Mi, 2017). Setelah perdebatan sengit terjadi di parlemen, beberapa partai yang berada di dalam ruangan keluar dengan 135 kursi sebelum pemungutan suara berlangsung, beberapa orang meninggalkan bendera Catalunya dan Spanyol di kursi mereka. Sedangkan dari luar gedung parlemen, massa pendukung

kemerdekaan berkumpul di luar parlemen bersorak dan melambai-lambaikan bendera, termasuk bendera separatis Catalunya "Estelada", saat hasil kemerdekaan diumumkan. Kurang dari satu jam kemudian, Senat Spanyol memberikan kekuasaan kepada pemerintah Madrid di bawah Pasal 155 Konstitusi Spanyol untuk memecat Presiden Catalunya dan kabinet Catalunya, serta membubarkan parlemennya pada beberapa jam setelah anggota parlemen di wilayah otonom Catalunya menentang pemerintah pusat dan memilih untuk mengumumkan kemerdekaan. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy mengadakan pemilihan baru dan memecat kepala polisi Catalunya, karena dinyatakan gagal dalam mengemban tugasnya untuk menguasai pemberontak di Barcelona. Hal ini dilakukan karena diperlukan untuk memulihkan legalitas, setelah terjadi krisis politik dan konstitusional yang telah membuat suasana yang mencekam negara tersebut selama berbulan-bulan (<https://yenisafak.com>, 2017).

Pasca referendum bulan Oktober, Spanyol telah mengambil alih kendali langsung Catalunya dan mengadakan pemilihan suara secara ilegal. Pemilihan ini akan mengukur reaksi publik setelah sebuah deklarasi kemerdekaan oleh parlemen Catalunya. Krisis konstitusi yang tengah menimpa wilayah tersebut telah mendesak ribuan perusahaan untuk meninggalkan wilayah tersebut dan beberapa anggota pemerintah sebelumnya telah melarikan diri dari wilayah tersebut atau telah dikirim ke penjara Spanyol. Sedangkan, Carles Puigdemont, mantan presiden Catalunya, tidak dapat memberikan suaranya secara pribadi karena saat ini tinggal di pengasingan di Belgia dan melewatkan *cut off date* untuk mendaftar untuk memilih di luar negeri (<http://cataloniavotes.eu>, 2017).

Demikian bunyi dari konstitusi pasal 155 yang secara khusus, tertulis, "Jika sebuah masyarakat yang mengatur dirinya sendiri tidak memenuhi kewajiban yang dikenakan padanya oleh undang-undang dasar atau undang-undang lain, atau bertindak dengan cara yang sangat merugikan kepentingan umum Spanyol, pemerintah dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memaksa masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut, atau untuk melindungi kepentingan umum tersebut di atas" (Konstitusi Spanyol 1978).

Kesimpulan

Menganalisis kegagalan kemerdekaan Catalunya didasarkan beberapa hal dan konsep yang sudah penulis jelaskan. Dalam konsep *self-determination* yang sudah penulis jelaskan, kepemilikan hak suatu negara bersifat relatif begitu juga bangsa Catalunya yang mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya dan untuk menggunakan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan semua yang sudah di sampaikan, oposisi merasa Catalunya dapat secara sah menarik hak untuk menentukan nasib sendiri untuk menyatakan kemerdekaan karena kebenaran fakta bahwa status politiknya dipaksakan dan tidak dapat mengembangkan dirinya di Spanyol. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini ilegal berdasarkan konstitusi Spanyol yang menahan agar hal ini tidak dapat dilakukan.

Dalam konsep *secession* terdapat beberapa indikator yang belum mencapai titik bahwa Catalunya belum dapat merealisasikan kemerdekaannya sehingga gerakan memisahkan diri ini dapat dikatakan gagal. Yang mana salah satu ciri keberhasilan pemisahan diri ini mendapat pengakuan dari dunia internasional baik negara maupun organisasi internasional, namun Catalunya belum mendapatkan pengakuan tersebut. Baik dari PBB, organisasi internasional, maupun Uni Eropa yang mana dari segi wilayah Catalunya masuk ke dalam wilayah eropa. Kemudian, adanya ciri dari pemisahan diri (*secession*) ini adanya aksi pertumpahan darah, ini adalah titik akhir reaksi akan

permintaan pemisahan diri yakni puncak dari *secessionis* bahwa untuk mencapai tujuan pemisahan diri. Namun di Catalunya hal ini tidak terjadi dan tidak dapat merealisasikan pemisahan diri dari Spanyol.

Adanya korelasi konsep penentuan nasib sendiri untuk menentukan kondisi pemisahan diri mereka dari yang menunjukkan bahwa kemerdekaan dapat dibenarkan oleh pentingnya identitas nasional. Konsep Self-determination dan *Secession* ini memiliki prinsip yang berbeda namun dapat dielaborasi dalam permasalahan ini dengan konsep-konsep yang cukup relevan untuk menggambarkan fenomena terkait keinginan Catalunya untuk menentukan nasibnya sendiri untuk memisahkan diri dari Spanyol. *Secession* bisa menjadi tujuan yang sah dari gerakan penentuan nasib sendiri Catalunya.

Dalam hal ini penulis menyebut Catalunya sebagai sebuah bangsa karena mengacu pada unsur-unsur bangsa yang ditemukan dalam tiga hal yang berbeda pendekatan untuk mendefinisikannya ialah: kelompok etnis, budaya, dan kewarganegaraan. Dalam kasus Spanyol, isu identitas nasional adalah masalah yang kompleks yang tidak kalah pentingnya karena warisan Perang Sipil dan Peraturan Franco hal ini juga menyangkut kembali kepada sejarah. Identitas tidak didefinisikan oleh satu faktor, baik itu bahasa atau lainnya, tapi dengan banyaknya unsur halus itu Catalunya berbagi perbedaan seperti, bahasa yang mana masyarakat Catalunya sudah mau berbagi untuk mengajarkan bahasa Katalan pada penduduk imigran dan bahasa Batalan ialah bahasa resmi ke-empat di Spanyol. Dalam indikator identitas nasional ini kekuatan untuk pemisahan diri dapat dikatakan netral sebagai faktor untuk pemisahan diri.

Masalah legitimasi juga mempengaruhi kegagalan kemerdekaan Catalunya, bahkan merupakan indikator utama bahwa Catalunya telah gagal dalam usahanya untuk pemisahan diri dan menjadikan Catalunya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Ketika pemerintah Spanyol memutuskan untuk menggunakan Konstitusi Spanyol pasal 155, dimana konstitusi Spanyol ini memiliki kekuatan di bidang hukum yang mampu untuk merebut kembali kendali dari institusi komunitas otonom dalam keadaan genting atau darurat. Hal ini diterapkan di Catalunya setelah deklarasi kemerdekaan sepihak dari presiden Catalunya. Dengan menarik kesimpulan, bahwa faktor utama yang dapat menghentikan aksi Catalunya dalam pemisahan diri dari Spanyol adalah konstitusi Spanyol pasal 155. Yang dapat mencabut status wilayah otonomnya yang sudah dibuktikan kekuatan konstitusi Spanyol pasal 155 ini di bab sebelumnya.

Referensi

- Anadolu Agency, (2017, 21 Desember), "*Catalans vote amid independence stand-off with sapor*", <https://www.yenisafak.com/en/news/catalans-vote-amid-independence-stand-off-with-spain-2891145>, diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
- Bonime, Andrea. et. al. "*Constitution Making and Democratization*", "*The Spanish Paradigm*" https://www.usip.org/sites/default/files/Framing%20the%20State/Chapter15_Framing.pdf, diunduh 27 November 2017.
- Catalonia, Laporan bahasa Katalan, "*Report on linguistic rights in Catalonia*" <http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3709/Report%20on%20linguistic%20rights%20in%20Catalonia.pdf>, diakses pada tanggal 12 November 2017.
- Catalonia. (2017, 10 Oktober), "*Official Statement by the President on the Political Situation*", <http://www.statewatch.org/news/2017/oct/es-catalonia-puigdemont-generalitat-statement-10-10-17.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2017.
- Catalonia. Buku Putih "*White Paper IIII The National Transition of Catalonia*", http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_catalana/Subinici/Llistes/nou-estat/catalonia-new-state-europe/national-transition-catalonia.pdf, diakses pada 28 November 2017.

- Catalunya. Data Statistik (2017, 01 Januari), "*Official Statistic website of Catalonia*", <https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=245&lang=en>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2017
- CataloniaVotes*, <http://www.cataloniavotes.eu/en/8-april-2014/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.
- Carley, Patricia. "*self-determination sovereignty, territorial integrity, and the right to secession*", <https://www.usip.org/sites/default/files/pwks7.pdf>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2017
- Cogins. Bridget L. (2006), "*Secession recognition & the international politics of statehood*", https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1154013298&disposition=inline, diunduh 20 Desember 2017.
- Cultiaux, Yolaine. "*Shaping Of A Nation: Catalan History And Historicity In Post-Franco Spain*", <https://www.lama.univ-savoie.fr/~vuillon/DIECKH1.pdf>, diakses tanggal 18 Oktober 2017.
- Democratic Progress Institute*, "*DPI Briefing Note Catalonia: From 2012 to 2016*", <http://www.democraticprogress.org/wp-content/uploads/2016/06/DPI-Briefing-Note-Catalonia-2012-2016.pdf>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.
- DifferenceBetween.net*, (2017) "*difference between Spain and Catalonia*" <http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between-spain-and-catalonia/> diakses tanggal 16 Oktober 2017.
- Henry. et. al. (2017), "*Language Policy and Identity: the case of Catalonia*", <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0962021960060106>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2017.
- International Covenant on Civil on Political Rights*, <http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>, diakses pada 25 November 2017.
- Kevin Mermel, (2017, 06 April), "*The End of the State of Autonomies? An Analysis of the Controversy Surrounding the 2010 Spanish Constitutional Court Ruling on Catalonia's 2006 Statute Of Autonomy*", https://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.id/&httpsredir=1&article=2312&context=honr_theses, diakses pada 28 November 2017.
- Lohmar, Ramon. (2015, 10 Juni), "*Catalan Paradiplomacy, Secession and Secessionism and State Sovereignty*", <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/35323/Lohmar%2C%20Ramon%3%B3n-s1418521-MIRD%20Thesis-2015.pdf?sequence=1>, diunduh 15 November 2017.
- Marinzel, Zia. (2014), "*Catalonia: The Quest for Independence from Spain Anastazia Marinzel*", <https://collected.jcu.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.id/&httpsredir=1&article=1039&context=honorspapers>, diakses tanggal 17 Oktober 2017
- Mi, Andres Boix Palop Mi, (2017, 27 September), "*The Catalunya Conondrum, Part 2 : A Full-Blown Constitutional Crisis for Spair*", <https://www.uv.es/seminaridret/sesiones2018/catalonia/boix02.pdf>, diakses pada tanggal 12 November 2017.
- RiskHedge*, (2017, 06 Oktober) "*Catalonia's Referendum Unmasks Authoritarianism*" <http://riskhedge.com/post/catalonias-referendum-unmasks-authoritarianism>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017
- Smith, Ben. (2017, 31 Agustus), "*The Catalan independence vote 2017*", <http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8078/CBP-8078.pdf>, diakses tanggal 19 Oktober 2017
- Spanyol, "konstitusi Spanyol 1978", <https://www.eui.eu/Projects/InternationalArtHeritageLaw/Documents/NationalLegislation/Spain/spanishconstitution1978.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2017.

- Spanyol, "konstitusi Spanyol"
<http://www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/ispania.pdf>, diakses pada 18 Oktober 2017.
- Spanyol. Undang-undang konstitusi Spanyol Tahun 1978 ,
<https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionINGLES.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2017.
- Suesse, Marvin. (2017), "*Causes and Consequences of Secessionist Movements: Lessons from the soviet Breakup*",
<https://feb.kuleuven.be/VIVES/publicaties/briefings/briefings-2016/VIVES%20Briefing%202016.07%20-%20Suesse%20-%20%20Secessionist%20Movements.pdf>, diunduh tanggal 18 November 2017.
- The New York Times*, (2017, 05 Oktober), "*Catalonia Separatism Revives Spanish Nationalism*",
<https://www.nytimes.com/2017/10/05/world/europe/catalan-independence-referendum.html>, diakses pada 25 November 2017.
- The Guardian*, (2016, 06 Oktober), "*Spanish Court blocks Catalan Parliament from declaring independence*"
<https://www.theguardian.com/world/2017/oct/05/spanish-pr-mariano-rajoy-warns-of-greater-harm-from-catalonia-independence-plans>, diakses pada 19 November 2017.
- The Jakarta Post*, (2017, 20 November), "*Indonesia does not recognize 'unilateral' Catalan independence declaration*",
<http://www.thejakartapost.com/news/2017/10/29/ri-does-not-recognize-unilateral-catalan-independence-declaration.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2017.
- UN, (1945), Piagam PBB "*Charter of The United Nations and Statute of the International Court of Justice*",
<https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017.
- UN, (1976), Perjanjian Konvenan Internasional
<https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2017
- UNNewsCentre*, (2013, 12 Maret), "*Protection of minority languages is human rights obligation, UN expert says*",
<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44352>, diakses pada tanggal 2 Desember 2017.
- Wardhani, Baiq, "Globalisasi & Konflik Etnis; Strategi audibility dan visibility gerakan pemisahan"
https://www.academia.edu/902463/Startegi_Audibility_dan_Visibility, diunduh tanggal 18 Oktober 2017.